



Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia is licensed under
A Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL MELALUI PENDEKATAN KEWILAYAHAN (STUDI KASUS ANTARA PEKERJA DI KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI)

Moh Fadil¹⁾, Haslita Rahmawati Hasan²⁾, Arifuddin Abd.Muis³⁾, Juraid Abdul Latief⁴⁾

¹⁾ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
E-mail: realmefadil5i@gmail.com

²⁾ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
E-mail: haslitahasan1980@gmail.com

³⁾ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
E-mail: arifamuis88@gmail.com

⁴⁾ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
E-mail: juraid1958@gmail.com

Abstract. This study discusses the social conflict that occurred between workers in Bahodopi District, Morowali Regency, which was triggered by misunderstandings, differences in interests, and weak communication between groups. The researcher used a regional approach as a method of conflict resolution, taking into account the social, cultural, and geographical conditions of the local area. The method used was qualitative with case studies. Data were collected through interviews and documentation of community leaders, government, and worker representatives. The results of the study showed that conflict resolution was carried out through cross-sector cooperation, such as limiting unauthorized group activities and strengthening the role of harmony figures. The role of the government is very important in mediation and social supervision, especially through regulation and cross-ethnic communication. The regional approach has proven effective in creating a peaceful atmosphere and preventing similar conflicts from recurring

Keywords : Settlement mechanism, Social conflict, Territorial approach

Abstrak. Penelitian ini membahas konflik sosial yang terjadi antara para pekerja di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, yang dipicu oleh kesalahpahaman, perbedaan kepentingan, dan lemahnya komunikasi antar kelompok. Peneliti menggunakan pendekatan kewilayahan sebagai metode penyelesaian konflik, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan geografis wilayah setempat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap tokoh masyarakat, pemerintah, dan perwakilan pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan melalui kerjasama lintas sektor, seperti pembatasan kegiatan kelompok tanpa izin dan penguatan peran tokoh kerukunan. Peran pemerintah sangat penting dalam mediasi dan pengawasan sosial, terutama melalui regulasi dan komunikasi lintas etnis. Pendekatan kewilayahan terbukti efektif dalam menciptakan suasana damai dan mencegah konflik serupa terulang kembali.

Kata Kunci : Mekanisme penyelesaian, Konflik sosial, Pendekatan kewilayahan

Pendahuluan

Konflik sosial merupakan suatu perselisihan yang terjadi antar anggota masyarakat yang sering ditemukan di setiap wilayah. Akbar (2022) mengatakan bahwa “masalah konflik sosial masih menjadi persoalan serius yang terjadi hingga saat ini, konflik yang terjadi melibatkan masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah.” Konflik sosial ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Salah satu media *strateginews* (2024) memberitakan masalah adanya konflik sosial di Bahodopi bahwa “pada hari senin tanggal 7 juni 2024 telah terjadi konflik sosial yang dilakukan oleh para pekerja yang di sebabkan karena kesalah pahaman antara kedua belah pihak. Mencermati permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bahodopi saat ini adalah suatu wilayah pertarungan (*battle area*) karena seringnya di temukan konflik sosial antara pekerja.

Di dalam geografi permasalahan seperti ini sangat berperan penting untuk membentuk struktur sosial terjadinya konflik salah satunya yaitu faktor geografis, sumber daya alam, batas wilayah, serta kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang dimana wilayahnya sering terjadi konflik sosial sehingga masih menjadi masalah sampai saat ini. Konflik di Sulawesi Tengah sering kita temukan di beberapa wilayah salah satunya yaitu daerah Kabupaten Morowali. Priyambada, (2023) Konflik sosial di daerah Kabupaten Morowali tepatnya di Kecamatan Bahodopi merupakan sebuah konflik jenis interpersonal. Menurut Sjafari (2017) Konflik interpersonal merupakan konflik yang muncul di antara dua individu. Konflik interpersonal biasa muncul di antara rekan kerja, teman, anggota keluarga, atau antara supervisor dan karyawan. dengan adanya suatu konflik sosial ini selalu melibatkan antara para pekerja pendatang.

Konflik ini sering dilakukan oleh para pekerja yang disebabkan oleh berbagai macam masalah sehingga terjadilah perkelahian, maka mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan yaitu melalui pendekatan kewilayahan yang bertujuan untuk menyelesaikan bentuk permasalahan di suatu wilayah baik secara geografis, sosial, ataupun budaya. Dalam pendekatan kewilayahan ini melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan lokal untuk dapat menemukan solusi sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Wibowo et al., (2021) menyatakan bahwa “Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah yaitu berupa mediasi hingga arbitrase yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian, hingga saat ini belum memberikan hasil yang optimal akibat lemahnya sistem hukum yang berlaku sehingga konflik masih terus terjadi.” Fauzi (2023) menyampaikan bahwa “mekanisme penyelesaian merupakan upaya untuk mengakhiri atau menyelesaikan perselisihan atau pertentangan antara pihak-pihak yang berbeda.” Mekanisme memiliki arti rangkaian untuk menyelesaikan masalah untuk mengurangi kegagalan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Konflik sosial merupakan

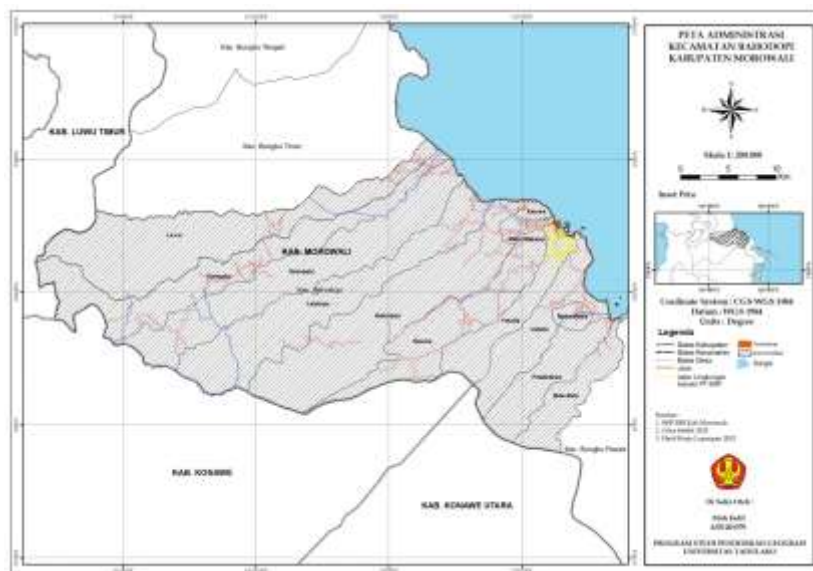
ketegangan antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berupaya untuk melukai, menghancurkan, atau membuat pihak lain merasa tidak berdaya atau tidak berarti (Mesra et al., 2023).

Mekanisme penyelesaian konflik melalui pendekatan kewilayahan berupaya memperkuat ketahanan sosial dan menciptakan solusi yang berkelanjutan, sesuai dengan konteks spesifik wilayah yang terdampak konflik. Seperti yang dinyatakan oleh Yusuf (2023) bahwa "wilayah adalah sebuah keputusan politik yang dalam praktiknya dituangkan dalam suatu keputusan yang mengikat dan konstitusional." Kewilayahan sering di katakan sebagai pendekatan geografi karena menyatukan sebuah pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi.

Pada pendekatan ini sangat mendorong adanya kolaborasi antar berbagai masyarakat untuk menciptakan suasana yang baik dan inklusif dalam komunitas. Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali merupakan wilayah kawasan industri berbasis nikel, sehingga ketika menjadi sebuah kawasan industri dapat membawa dampak pada mobilitas penduduk yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan sosial sehingga dapat untuk mengetahui mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat dengan menggunakan pendekatan kewilayahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan menemukan masalah, memecahkan masalah, dan mengembangkan pengetahuan baru melalui pendekatan kewilayahan. Penelitian ini dapat mengungkap kebenaran secara variabel yang saling terikat dan memengaruhi satu sama lain. Metode penelitian sebagai cara yang terencana, sistematis, ilmiah, dan rasional untuk mengumpulkan fakta.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, penelitian di wilayah Bahodopi ini dilakukan berdasarkan kasus konflik sosial yang sering terjadi yang dilakukan selama bulan November 2024 sampai selesai. Subjek penelitian yang berfungsi sebagai informasi dan data yang banyak berguna dalam menganalisis sebuah masalah. Peneliti terlebih dahulu menentukan informasi lapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian (Listyawati, 2019)

Rusandi & Muhammad Rusli, (2021) mengemukakan “Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk digeneralisasikan, hal itu dapat dilihat dari beberapa jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kualitatif.” Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam arti penelitian kualitatif yaitu menggambarkan serta menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang akan diteliti.

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan november 2024 di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan secara *purposive sampling*, yaitu penentuan informan yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria tertentu yang ada pada informan. Jumlah informan sebanyak 7 orang, dimana informan tersebut sudah mewakili seluruh elemen masyarakat yang dianggap memahami tentang situasi dan kondisi konflik sosial di Bahodopi Hasil penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah narasumber berdasarkan status sosial

No	Status informan	Jumlah orang	Persentase %
1	Tokoh masyarakat/ kerukunan	1	14,29%
2	Pekerja	4	57,14%
3	Pemerintah	2	28,57%
	Total	7	100%

Berdasarkan tabel 1 diatas Data menunjukkan pembagian informan berdasarkan status atau latar belakang mereka, yang terdiri dari 7 orang secara total. Persentase menunjukkan proporsi masing-masing kelompok dari jumlah keseluruhan informan. Tokoh masyarakat/kerukunan (14,29%) Hanya 1 orang dari total 7 informan yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat atau tokoh kerukunan.

Ini menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan bagian yang kecil dari total informan, sekitar 14,29%, atau kurang dari seperlima Pekerja (57,14%) Kelompok ini mendominasi jumlah informan, dengan 4 orang atau 57,14% dari total. Ini berarti lebih dari setengah dari semua informan berasal dari kalangan pekerja,

menunjukkan bahwa perspektif pekerja lebih banyak diwakili dalam data ini. Pemerintah (28,57%) Sebanyak 2 orang informan berasal dari unsur pemerintah, yang mencakup 28,57% dari keseluruhan. Ini menandakan hampir sepertiga dari total informan memiliki latar belakang sebagai aparatur pemerintah.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap 7 informan, diketahui bahwa mayoritas informan berasal dari kalangan pekerja, yaitu sebanyak 4 orang (57,14%). Sementara itu, 2 orang (28,57%) merupakan perwakilan dari unsur pemerintah, dan hanya 1 orang (14,29%) yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat atau tokoh kerukunan. Temuan ini menunjukkan bahwa pandangan yang dikumpulkan dalam kajian ini lebih banyak merepresentasikan pengalaman dan perspektif pekerja, dengan proporsi yang cukup signifikan. Meski demikian, keterlibatan unsur pemerintah dan tokoh masyarakat tetap memberikan variasi sudut pandang yang berharga dalam analisis.

Tabel 2 Nama dan identitas responden

No	Inisial	Umur	Jenis kelamin	Profesi	Asal
1	IL	41	Laki-laki	Ketua kerukunan	Bahodopi
2	AG	24	Laki-laki	Pekerja	Bahodopi
3	EB	24	Laki-laki	Pekerja	Bahodopi
4	AN	44	Laki-laki	Pemerintah	Keurea
5	AB	29	Laki-laki	Pekerja	Bahomakmur
6	IH	26	Laki-laki	Pekerja	Bahodopi
7	SL	32	Perempuan	Pemerintah	Bahodopi

Berdasarkan tabel 2 di atas menjelaskan nama dan identitas responden dengan inisial nama dan kriteria sebagai berikut

1. IL (41 tahun, laki-laki) Seorang *ketua kerukunan* sekaligus *tokoh masyarakat* yang sangat dihormati di Bahodopi. Ia memiliki peran sentral dalam menyelesaikan konflik karena mampu mengkoordinasi para pendatang dan menjalin kerja sama dengan pemerintah serta aparat keamanan.
2. AG (24 tahun, laki-laki) Merupakan seorang *pemuda dan pekerja di PT IMIP* yang telah lama tinggal di Bahodopi. Ia pernah terlibat konflik dan merasa waspada ketika berada di luar rumah. Ia menggambarkan kondisi psikologis para pemuda pendatang pasca konflik yang penuh kehati-hatian.
3. EB (24 tahun, laki-laki) Pendatang dari suku Bugis yang juga pernah *terlibat langsung dalam konflik* pada 7 Juni 2024. Ia menilai konflik sebagai masalah pribadi di tempat kerja yang seharusnya tidak meluas menjadi konflik sosial.
4. AN (44 tahun, laki-laki) Seorang *pegawai pemerintah di Kantor Kecamatan Bahodopi* dan juga *tokoh adat serta pemuda*. Ia berperan aktif sebagai *mediator*

konflik atas nama pemerintah dan masyarakat. Ia terlibat dalam merancang kebijakan dan langkah strategis untuk mencegah konflik berulang.

5. AB (29 tahun, laki-laki) Pendatang dari Sulawesi Selatan yang bekerja di PT IMIP dan *sering berada di lokasi saat konflik terjadi*. Ia merasa malu dengan seringnya konflik, terutama karena pelakunya banyak dari wilayah asalnya. Ia menginginkan perdamaian agar masyarakat tidak semakin dirugikan.
6. IH (26 tahun, laki-laki) Seorang *pemuda dan pekerja di PT IMIP yang pernah mengalami konflik karena kesalahpahaman kecil* dengan teman sekampung. Ia menekankan pentingnya *menghindari konflik yang tidak perlu* demi menjaga keharmonisan.
7. SL (32 tahun, perempuan) Satu-satunya *tokoh perempuan dalam wawancara*, menjabat sebagai *sekretaris desa Bahodopi*. Ia menyoroti pentingnya *kerja sama lintas elemen masyarakat* (pemerintah, ketua kerukunan, aparat) dalam menangani konflik. Ia juga menyatakan bahwa akar konflik seringkali adalah kesalahpahaman kecil.

Selanjutnya berdasarkan tabel 2 di atas menjelaskan berbagai identitas responden yang berasal dari latar belakang yang beragam: masyarakat adat, pemuda pekerja, hingga pejabat desa. Umumnya mereka sepakat bahwa konflik sosial di Bahodopi dipicu oleh kesalahpahaman kecil, perbedaan budaya, dan kurangnya komunikasi. Penyelesaian konflik dianggap efektif jika dilakukan dengan pendekatan kewilayahan, melalui kerja sama antara *pemerintah, tokoh masyarakat, kerukunan, dan aparat*.

Tabel 3. Frekuensi isi kunci dalam wawancara

Tema	Jumlah Responden	Persentase %
kesalahpahaman individu	5 responden	
Perlunya kerjasama kerukunan	6 responden	86%
Peran pemerintah lokal	5 responden	71%
Kegiatan Pemicu	4 responden	57%
Perubahan perilaku	5 responden	71%

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan isi kunci dalam wawancara, hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas responden percaya bahwa kesalahpahaman antar individu, peran pemerintah lokal, dan perubahan perilaku pasca konflik adalah faktor penting yang mempengaruhi terjadinya konflik atau bagaimana konflik dikelola.

Pembahasan

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi dari pemerintah dalam menyelesaikan Konflik sosial di Kecamatan Bahodopi yang merupakan suatu konflik interpersonal yang dimana konflik ini melibatkan antara para pekerja yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat dengan menggunakan pendekatan kewilayahan. Konflik sosial merupakan ketegangan antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berupaya untuk melukai, menghancurkan, atau membuat pihak lain merasa tidak berdaya atau tidak berarti (Mesra et al., 2023).

Yusuf (2023) bahwa "wilayah adalah sebuah keputusan politik yang dalam praktiknya dituangkan dalam suatu keputusan yang mengikat dan konstitusional." Kewilayahan sering di katakan sebagai pendekatan geografi karena menyatukan sebuah pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Pada pendekatan kewilayahan ini bahwasannya dapat memandang sebuah masalah, perbedaan, serta struktur atau fenomena didalam satu ruang.

Hasil perhitungan data yang telah dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan merancang kerangka berpikir oleh peneliti seperti yang dikatakan oleh Fallenia et al (2023) bahwa mengilustrasikan alur pikir harus sesama berhubungan dengan variabel yang diteliti sehingga biasa disebut sebagai paradigma atau model penelitian. Penelitian ini enunjukkan bahwa mayoritas informan berasal dari kalangan pekerja, yaitu sebanyak 4 orang (57,14%). Sementara itu, 2 orang (28,57%) merupakan perwakilan dari unsur pemerintah, dan hanya 1 orang (14,29%) yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat atau tokoh kerukunan. Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kamera foto atau kamera audio-visual ataupun wawancara sebuah wawancara yang bebas dan pedoman wawancaranya hanya berupa garis-garis besar suatu permasalahan yang akan ditanyakan (Syafutra et al., 2023). Sehubungan dengan itu, dokumentasi yaitu rekaman suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan yang dinamai juga dengan kata ilmu dokumenter (Lembaga, 2013).

Dewi (2021) bahwa "Pengembangan wilayah merupakan topik kajian yang kompleks untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Analisis strategi pengembangan wilayah akan mencapai keberhasilan berbagai sektor ekonomi. Analisis HINCO membantu dalam merumuskan kondisi demografis dan kewilayahan suatu daerah untuk mencapai pengembangan wilayah yang baik."

Safithri et al (2023) mengatakan "konflik ini sebagian besar hanya disebabkan oleh masalah-masalah yang bersentuhan dengan pemuda, misalnya persaingan atas sesuatu hal, persoalan bersenggolan di jalanan, saling ejek antar anak muda, kalah pertandingan olahraga atau masalah perselisihan anak muda lainnya." Dengan adanya penelitian diharapkan untuk dapat dipahami serta diketahui bagaimana saja mekanisme yang dapat dilakukan dalam mengatasi berbagai masalah konflik sosial

dikehidupan masyarakat dengan menggunakan pendekatan kewilayahan serta bermanfaat untuk peneliti berikutnya.

Nasa & Nuwa, (2021) menyatakan “Nilai-nilai kearifan lokal diyakini mampu menjadi alternatif dalam fase-fase penurunan intensitas konflik. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.”

Cinu (2017) mengemukakan bahwa “dengan munculnya konflik ini senjata dengan jenis sederhana, seperti senjata tradisional yang dipakai dalam konflik dapat berakibat fatal bagi kelompok tersebut, karena dalam situasi perang, tujuan utama yang harus dicapai, adalah bagaimana korban dari pihak lawan dikalahkan.” Konflik sosial menjadi suatu referensi karena sangat dinamis, mengingat setiap kelompok masyarakat mempunyai sikap yang sangat berbeda dalam menghadapi sebuah masalah.

Pertemuan pertama Konflik Bersifat Interpersonal dan Dipicu Kesalahpahaman Konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Bahodopi utamanya bersifat interpersonal. pekerja, dan sering kali bermula dari hal-hal sepele, kesalahpahaman, perbedaan kebiasaan, dan perbedaan nilai antar kelompok etnis.

Pertemuan kedua Penyelesaian Dilakukan Melalui Pendekatan Kewilayahan Pemerintah setempat (terutama di tingkat kecamatan dan desa) mengatasi konflik dengan mengacu pada karakteristik wilayah, yaitu:

Menyadari perbedaan latar belakang etnis dan sosial tiap desa.

Menerapkan regulasi khusus untuk setiap bentuk perkumpulan, termasuk permukiman berbasis etnis. Melibatkan tokoh kerukunan, tokoh adat, dan tokoh pemuda sebagai mediator konflik.

Pertemuan ketiga bahwa Masalah sebenarnya yang menyebabkan konflik yaitu hubungan yang saling berinteraksi dalam konflik seperti konflik, sikap, perilaku. Seperti yang dikatakan oleh Wahyuni et al (2023) “Segitiga konflik merupakan sebuah model yang digunakan dalam menganalisis suatu konflik sosial, yaitu dengan cara mengidentifikasi serta mengkategorikan berbagai macam aspek dan dimensi konflik.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menyadari bahwa pentingnya komunikasi, kerjasama antara pemerintah maupun ketua-ketua kerukunan disetiap wilayah seperti yang dikatakan (Janah et al., 2023) bahwa konflik-konflik tersebut di sebabkan oleh beragam masalah, mulai dari masalah dalam pekerjaan, kesalah pahaman antara kedua belah pihak, dan beragam masalah lainnya. Penyebab terjadinya konflik sosial masyarakat yaitu adanya perbedaan individu dalam memahami dan menyikapi suatu permasalahan, serta adanya perbedaan kepentingan. Tetapi menurut Hasdin, & Nasran (2021) menyatakan bahwa “Kondisi karakter bangsa belakangan ini kian mengkhawatirkan dan meresahkan. Pertentangan, pencurian, perampokan, pembunuhan, perusakan alam, penyalahgunaan kekuasaan, narkoba, dan berbagai perbuatan asusila lainnya terus berlangsung. Maka dari itu Pemerintah perlu program sosialisasi dan edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat agar sadar akan hal tersebut serta diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah

kecamatan, desa, kepolisian, dan lembaga adat dalam menerapkan kebijakan yang berorientasi pada stabilitas sosial jangka panjang.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, antara pekerja yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan kepentingan, dan kesalahpahaman yang sering kali berakhir pada ketegangan antar kelompok. Dalam menghadapi konflik ini, pendekatan kewilayahan digunakan sebagai strategi utama dalam penyelesaian, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, dan geografis.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. (2022). *No Title Konflik Agraria Masih Jadi Persoalan Serius di Sulawesi Tengah*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/rfwzii480/konflik-agraria-masih-jadi-persoalan-serius-di-sulawesi-tengah>
- Cinu, S. (2017). AGAMA, MELITERISASI DAN KONFLIK (Kasus Poso, Sulawesi Tengah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.24014/af.v15i1.4007>
- Dewi, K. (2021). Analisis Demografi dan Kewilayahan Banyuwangi dengan Pendekatan HINCO untuk Pengembangan Wilayah. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.30631/demos.v1i1.1025>
- Fallenia, F. Della, Syafitri, R., & Syahputri, A. Z. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166. <https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/>
- Fauzi, I. (2023). Manajemen Konflik dan Cara Penyelesaian Konflik dalam Organisasi Sekolah. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(1), 108–115. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i1.127>
- Hasdin4, Nasran5, S. N. A. S. (2021). INNOVATIVE : Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education. *Innovative*, 1(2), 552–560.
- Janah, R., Hidayat, S., Amin, I., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Mataram, U., Hukum, F., Mataram, U., Hukum, F., Mataram, U., Ganjar, D., Mareje, D., Lembar, K., Barat, K. L., Lembar, K., Sosiologis, P., Lembar, K., & Justice, R. (2023). *Jurnal Parhesia*. 62, 121–128.
- Lembaga, P. P. (2013). *Pidato_Kepustakawanan_BS-libre*.
- Listyawati, A. (2019). Peranan Forum Keserasian Sosial Dalam Mengatasi Konflik Sosial Di Ambon. *Sosio Konsepsia*, 8(2), 88–100. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1496>
- Mesra, R., D.A Santie, Y., & Uti, M. (2023). Konflik Sosial Di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. *JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education*, 4(1), 21–30. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v4i1.5647>
- Nasa, R., & Nuwa, G. (2021). Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal dalam Kehidupan Etnis Sikka Krowe. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1720>
- Priyambada, N. (2023). Strategi Penanganan Konflik Sosial Tambang Emas Pt. Bsi Di Wilayah Hukum Polres Banyuwangi. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(9), 836–842. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3504>

- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Safithri, R., Anriani, H. B., & ... (2023). Akses Perempuan Sebagai Mediator Konflik Antar Desa Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. ... *Nasional Sosiologi ...*, 1–3.
<https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/83%0Ahttps://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/download/83/82>
- Sjafari, A. (2017). Pemetaan Konflik Sosial di Kota Tangerang Provinsi Banten. *Jurnal of Government - JOG*, 2(2), 135–157.
- Strateginews. (2024). *NoPerkelahian Antar Pekerja Tambang di Morowali, Kapolres Minta Jangan Bawa-Bawa Isu SARA Title*. Serikat Media Siber Indonesia.
<https://strateginews.id/2024/06/12/perkelahian-antar-pekerja-tambang-di-morowali-kapolres-minta-jangan-bawa-bawa-isu-sara/>
- Syafutra, R., Handayani, H., Alamsyah, Z., Ahka, R., Saputra, F. D., & Safitri, M. (2023). Mitigasi konflik manusia-buaya muara di Kelurahan Semabung Lama dan Pasir Putih, Kota Pangkalpinang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1512–1517.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/13448>
- Wahyuni, A., Hadi, N., & Achmad Perguna, L. (2023). Segitiga Konflik Kelompok Desa Migran Produktif (Desmigratif) Di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 9(1), 33–50.
<https://doi.org/10.33369/jsn.9.1.33-50>
- Wibowo, A., Wati, A., Lisdiana, A., Kunci:, K., Konflik, M., Daerah, P., Perusahaan, M., & Batubara, T. (2021). Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Tambang Batubara (Studi Kasus Di Kalimantan Timur) Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan. *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education*, 2(1), 1–14. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy>
- Yusuf, J. H. (2023). Pemekaran Dan Konflik Batas Wilayah Dalam Perspektif Teoritik. *GeoCivic Jurnal*, 6(1), 98–110.